

DAFTAR PUSATAKA

BUKU

Aries Djaenuri, et.al, *Sistem Pemerintah Desa* (Tangerang: Universitas Terbuka, 2021), hlm. 1-4.

Bambang Trisantono Soemantri, *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, (Bandung: Penerbit Fokusmedia, 2011), hlm. 16-17.

Basuki Kurniawan, *Hukum Pemilihan Umum di Indonesia*, (Surabaya: Buku Pustaka Radja, 2020), hlm.77

Dr. Rahman Mulyawan, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Unpad Press, Sumedang, 2015, hlm, 26

H.A Tabrani Rusyan, *Membangun Desa Beprestasi*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2018), hlm.60

H. A. Tabrani Rusyam, *Membangun Efektifitas Kinerja Kepala Desa*, Bumi Aksara, Jakarta, 2018, hlm 8.

Huda, *Hukum Pemerintahan Desa Dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi*, hlm, 29.

Irfan Setiawan, *Pemerintahan Daerah*, IPDN, 2018, hlm, 3-5.

Leo Agustino, *Pilkada dan Dinamika Politik Lokal* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009) hlm. 188.

Nata Irwana, *Tata Kelola Pemerintahan Desa Era UU Desa*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2017, hlm 31-32.

Rahyunir Rauf, et.al, *Pemerintah Desa* (Pekanbaru: Zanafra, 2015), hlm. 1-9.

Sutoro Eko Yunanto, *Implementasi UU Desa: Perspektif Hukum Tata Negara dan*

Hukum Ekonomi,

Inteligensia Intrans Publishing, Jawa Timur, 2018, hlm. 111.

Umar Nain, *Relasi Pemerintahan Desa Dan Supradesa Dalam Perencanaan Dan Penganggaran Desa*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2017, hal 39.

UNDANG-UNDANG

Undang Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa, yang dijelaskan dalam Pasal 31-

Undang-Undang No 6 tahun 2014 tentang Desa, yang dijelaskan dalam Pasal 40. Undang-Undang dasar 1945, pasal 18.

Undang-Undang No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 1 Angka 2.

Indonesia, Putusan MK Nomor 128/PUU-XIII/2015, hlm, 21.

Peraturan Pemerintah No 34 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yang dijelaskan dalam Pasal 45.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 65 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, yang dijelaskan dalam Pasal 47 A.

Peraturan Bupati Jombang, nomor 34 tahun 2021 tentang tata cara pelaksanaan tahapan pemilihan kepala desa.

Peraturan-Peraturan.Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Meneteri Dalam Negeri No. 66 Tahun 2017 Tenentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala desa.

JURNAL

Amir Darmanto, “*Pengisian Perangkat Desa Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Tahun 2018 Suatu Kajian Perkara NO.54/G/2018/PTUN.SMG,*” Jurnal Ius Constituendum vol 4, no. 1 (2019): 66–77.

Amri Panahatan Sihotang et al., “*Pertimbangan Hakim Terhadap Keabsahan Ijazah Pondok Pesantren Sebagai Syarat Peserta Pemilihan Kepala Desa,*” Jurnal USM Law Review 6, no. 1 (2023): 332–44.

Dedi Irawan dan Firmansyah Putra, *Pemilihan Kepala Desa dengan Menggunakan Sistem E-Votting di Desa Ranggo Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun*, Limbago: Journal of Constitutional Law, Volume 2, Nomor 1, 2022, hlm. 24

Hoessein, Bhenyamin, *Hubungan Penyelenggaraan Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah*, Jurnal Bisnis dan Birokrasi No.1 Vol. 1 Juli. Departemen Ilmu Administrasi Fisip- UI, 2000, hlm, 16.

Hariyanto, “*Implications of State Policy Through Village Found Towards the Cultural Values of Mutual Cooperation in the Village*”, De Lega Lata: *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7, 1, 2022, hlm. 47.

Muh. Arif Rezki Ananda K , Irwan , Sofyan B, *Proses Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Dalam Pergantian Antar Waktu Di Desa Talumae Kecamatan Watang Sidenreng*, GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan ISSN: 2406-8721 (Media Cetak) dan ISSN: 2406-8985 (Media Online) Vol 10 Nomor 4 Juni 2024,hlm, 415-416.

Nurul Muammar , Ade Darmawan Basri, *Efektivitas Pelaksanaan Pemberhentian Kepala Desa Menurut Undang-Undang Tentang Desa*, Universitas

Islam Negeri Alauddin Makassar, Alauddin Law Development Journal ALDEV, Vol 4. No 1. Maret 2022, hlm. 192.

Siti Muslikhatul Ummah, Wahyu Beny Mukti Setiyawan Suparwi Suparwi, Siti Fatimah, *Demokrasi Dan Otonomi Desa Dalam Proses Pemilihan Kepala Desa Pasca Reformasi*, 2 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Semarang, Jurnal USM Law Review Vol 6 No 3 Tahun 2023, hlm, 1227.

SKRIPSI

Titin Putri Meimunah, *Demokrasi perwakilan dalam pemilihan kepala desa antar waktu di kabupaten pemalang*, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid, Pekalongan, 2024, hlm, 4.

INTERNET

Adhyasta Dirgantara, Novianti Setuningsih, “*Ini Alasan Ribuan Kades Demo Tuntut Masa Jabatan Jadi 9 Tahun*”, diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2023/01/17/14025251/ini-alasan-ribuan-kadesdemo-tuntutmasa-jabatan> dari 6-tahun-jadi-9-tahun pada 9-01-2025, pukul 09:53.

By simpeldesa, “*Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu*”, diakses dari <https://www.simpeldesa.com/blog/tata-cara-pemilihan-kepala-desa-antarwaktu/1533/>, pada 21-01-2025, pukul 19:31.

Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, “*Baleg Kembali Gelar Rapat Panja RUU Desa*”, diakses dari <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/45176/t/Baleg+Kembali+Gelar+Rapat+Panja+RUU+Desa>, pada 09-01-2025, pukul 10:05.

Info Desa, *Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu melalui Badan Desa*, diakses dari, <https://risehtunong.blogspot.com/2017/09/tatacara-pemilihankepala-desa-antar.html>, pada 28-01-

2025, pukul 08:15.

JDIH Bolaang Mongondow Utara, “Revisi UU Desa: 9 Tahun Jabatan Kepala Desa, Penambahan Tunjangan Rumah Tangga, Dan Kenaikan Siltap”, diakses dari <https://jdih.bolmutkab.go.id/login/detailberita/120#:~:text=Seperti%20diketahui%20sebelumnya%20C%20masa%20jabatan,tahun%20terhitung%20sejak%20tanggal%20pelantikan.> pada 09-01-2025, pukul 10:09.

Ni Luh Gede Astariyani, *Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Tentang Susunan Organisasi Dan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa*, Denpasar, Kerja Sama Pemerintah Kota Denpasar Dengan Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2016, (naskah akademik), diakses menggunakan internet, pada 05-01-2025, pukul 07:20

Suci Amaliyah, “Kepala Desa di Sejumlah Daerah Tolak Masa Jabatan Kades 9 Tahun”, diakses dari <https://www.nu.or.id/nasional/kepala-desa-disejumlah-daerah-tolak-masa-jabatankades-9-tahun-e6mXw> pada 09-01-2025, pukul 09:55.